

■ Diskusi Pilkada Bebas SARA

Harus Ciptakan Jurnalisme Sehat

KEDUNGMUNDU - Media sering dipergunakan untuk mengangkat citra calon kepala daerah, guna menyampaikan visi dan misi. Tapi, banyak juga yang menggunakan media untuk menjatuhkan orang lain, dengan disebar melalui media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Hal ini dikatakan Analis Kebijakan Madya Div Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sulisty Pujo Hartono, dalam Diskusi Pilkada Bebas SARA di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (24/5).

Menurut dia, hoax mengenai sosial-politik mendominasi dalam persebaran itu. "Jumlahnya mencapai 91,8%, isu SARA 88%, isu kesehatan 41,2%, isu makanan dan minuman 32,6%, dan soal penipuan 30%," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam penyebaran informasi bentuk hoax yang dominan, dilakukan dengan menyebar gambar sebanyak 37,5%, tulisan 62,1%, dan video 0,4%. Sementara media penyebarannya, radio 1,2%, email 3,1% media cetak 5%, televisi 8,7%, web

34,9%, aplikasi chat 62,8%, dan media sosial 92,4%.

Sulisty pujo berharap, agar citizen jurnalisme mampu menciptakan jurnalisme yang sehat. "Jika hoax terus disebar, ini bahaya. Keadaan yang kondusif bisa terganggu," jelasnya.

■ Kondusif

Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir menilai, kondusifitas situasi provinsi ini saat Pilkada 2018 ini cenderung kondusif. Dia mengaku bersyukur, atas situasi keamanan yang kondusif selama tahapan pilkada ini.

Hanya saja, lanjut dia, ada dua dugaan atas situasi kondusif tersebut, yakni dinamis atau permisif. "Kita tentu tidak



DISKUSI MEDIA: Sejumlah pimpinan media menjadi narasumber diskusi media Pilkada Bebas SARA di Kampus Unimus, Kedungmundu, Semarang, Kamis (24/5). ■ Foto: Danny Adriadhi Utama.

ingin terbangun suasana tenang yang negatif. Jangan golput, pilih calon dengan cara yang rasional," katanya.

Oleh karena itu, sambungnya lagi, sudah menjadi tugas ulama untuk mendorong umat berpartisipasi pada pilkada. Muhammadiyah sendiri, sudah menghadirkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar bisa dikenal oleh umat.

Sementara itu pengamat po-

litik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yuwanto menilai, realitas pilkada sering menunjukkan kepribadian ganda.

"Di satu sisi menunjukkan wajah mempesona penuh harapan, di bagian lain terdapat sisi gelap. Model calon bersponsor semacam ini, akan menghasilkan pemimpin yang kleptokrasi, pemimpin yang dikuasai para cukong," pungkas Yuwanto. ■ M.17-die